

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN REFORMASI  
ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
( Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Pati )**

**NASKAH PUBLIKASI**



**Disusun Oleh:**

**YELLA KENING AGUSTANTIKANINGSIH**

**B200110 046**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2015**

## HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini telah membaca naskah publikasi dengan judul:

**“PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Pati)”**

Yang ditulis oleh :

**YELLA KENING AGUSTANTIKANINGSIH**  
**B 200 110 046**

Penandatanganan berpendapat bahwa naskah publikasi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, Maret 2015

Pembimbing

**(Drs. M. Abdul Aris, M.Si)**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



  
**(Dr. Triyono, SE, M.Si)**

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN REFORMASI  
ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
( Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Pati )**

**YELLA KENING AGUSTANTIKANINGSIH  
(B200110046)  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Email: zeylla\_anthyca@yahoo.co.id**

**ABSTRACT**

*Tax is the biggest source income of a country in funding budgetary fund. Knowledge about taxation is one of factors to increase the pursuance of taxpayers. The reformation of taxation administration is a concrete step committed by government to increase tax income as in the form of pursuant taxpayers behavior. This research aims to know the influence of tax knowledge and taxation administration reformation to compliance tax.*

*The sample of this research is taxpayers who are registered in KPP Pratama Pati in 2014. The researcher used nonprobability sampling technique with incidental sampling method. The sample were obtained by 91 taxpayers. In this research, the researcher uses data analysis with multiple linear regression analysis.*

*The result showed that tax knowledge (PTP) and taxation administration reformation (RAP) have a significant influence on tax compliance. While the result of t test showed that: (1) tax knowledge (PTP) influences of tax compliance. It can be showed that value of  $t_{count}$  (4,472) is bigger than value of  $t_{table}$  (2,632) or significance value  $< \alpha$  (0,000 < 0,01). (2) Taxation administration reformation (RAP) influences of tax compliance. It can be showed that value of  $t_{count}$  (2,962) is bigger than value of  $t_{table}$  (2,632) or significance value  $< \alpha$  (0,004 < 0,01).*

**Keywords :** *Tax Knowledge, Taxation Administration Reformation, and Tax Compliance*

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN REFORMASI  
ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
( Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Pati )**

**YELLA KENING AGUSTANTIKANINGSIH  
(B200110046)**

**Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Email: zeylla\_anthyca@yahoo.co.id**

**ABSTRAK**

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar untuk membiayai pengeluaran negara. Pengetahuan tentang perpajakan merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Reformasi administrasi perpajakan merupakan langkah konkrit yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak sebagai wujud dari perilaku patuh Wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak dan reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pati tahun 2014. Teknik pengambilan sampel yang digunakan *nonprobability sampling* dengan metode *insidental sampling*. Sampel yang digunakan peneliti berjumlah 91 Wajib Pajak. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak (PTP) dan reformasi administrasi perpajakan (RAP) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Untuk hasil uji t menunjukkan bahwa : (1) Pengetahuan pajak (PTP) berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini ditunjukkan dari nilai  $t_{hitung}$  (4,472) lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  (2,632) atau nilai signifikansi  $<\alpha$  (0,000<0,01). (2) Reformasi administrasi perpajakan (RAP) berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini ditunjukkan dari nilai  $t_{hitung}$  (2,962) lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  (2,632) atau nilai signifikansi  $<\alpha$  (0,004<0,01).

**Kata Kunci** : *Pengetahuan Pajak, Reformasi Administrasi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak*

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar, sehingga dalam melakukan berbagai macam pembangunan memerlukan anggaran yang cukup besar setiap tahunnya. Semakin besar anggaran yang dikeluarkan, menuntut peningkatan pendapatan negara yaitu salah satunya dibidang perpajakan. Tanpa pajak sangat tidak mungkin negara ini dapat melakukan pembangunan.

Dalam struktur APBNP 2014, kontribusi penerimaan dalam negeri yang berupa pajak cukup signifikan yaitu sebesar Rp1.232 triliun dari pendapatan negara Rp 1.598 atau sebesar 77% dari pendapatan negara. Dari kontribusi tersebut, penerimaan pajak yang dicerminkan oleh kepatuhan Wajib Pajak pada tahun 2013 hanya mencapai *tax ratio* 13,50%, sedangkan pada tahun 2014 *tax ratio* diprediksi mencapai 14,50%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak negara Indonesia sangat rendah.

Rendahnya kepatuhan Wajib Pajak salah satunya disebabkan pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak yang masih minim. Menurut Gardina dan Haryanto (2006) dalam Mulya (2012) yang dikutip oleh Nisa dan Aji (2014) salah satu penyebab berpengaruhnya pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak adalah adanya sumber informasi perpajakan yang didapat oleh para Wajib Pajak. Sebagian besar Wajib Pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu juga ada yang diperoleh dari radio, televisi, surat kabar, internet, buku perpajakan, konsultan pajak, seminar pajak dan pelatihan pajak. Namun, frekuensi pelaksanaan kegiatan tersebut jarang dilakukan. Bahkan, pengetahuan tentang pajak belum secara komprehensif menyentuh dunia pendidikan. Oleh karena itu, pada tataran pendidikan mulai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi masih belum tersosialisasi pajak secara menyeluruh, kecuali mereka yang menempuh jurusan perpajakan.

Salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yaitu dengan penyempurnaan sistem administrasi perpajakan melalui penyampaian SPT PPh melalui *e-filing* untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah, sehingga kepatuhan Wajib Pajak diharapkan semakin meningkat. Perbaikan administrasi perpajakan diharapkan dapat mendorong peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, karena program reformasi administrasi perpajakan ini mempunyai tujuan tercapainya : (1) tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, (2) tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan (3) produktivitas pegawai perpajakan yang tinggi. Dengan diterapkannya sistem administrasi modern dapat meningkatkan pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak sehingga diharapkan dapat mendorong tingkat kepatuhan

Wajib Pajak. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi akan berdampak pada meningkatnya jumlah penerimaan pajak. Sehingga dapat mengoptimalkan jumlah penerimaan APBN guna membantu pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti empiris pengaruh pengetahuan pajak dan reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kuraesin (2009), tingkat kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh pengetahuan Wajib Pajak tentang perpajakan. Hal ini berarti, semakin baik tingkat pengetahuan pajak yang dimiliki Wajib Pajak maka semakin baik pula kepatuhan pajak yang dilakukan Wajib Pajak. Dengan meningkatkannya pengetahuan tentang peraturan pajak, menghitung pajak terutang dan pengisian SPT yang dimiliki Wajib Pajak berkesinambungan, maka akan menghasilkan kepatuhan pajak yang lebih optimal. Menurut Rohmawati (2012), pengetahuan perpajakan memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti banyaknya pengetahuan perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Hal yang sama juga didapat dari penelitian Siregar *et al.*, (2012) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, memiliki pengetahuan yang cukup tentang perpajakan sangatlah penting. Selain itu menurut Taman & Hyun, 2003 dalam Marziana *etal*, 2009 yang dikutip Siregar *et.al*, (2012), menyatakan bahwa pendidikan pajak adalah salah satu alat yang efektif untuk mendorong Wajib Pajak untuk lebih patuh.

H<sub>1</sub> : Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak

### **Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Lisnawati (2012), modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai modernisasi sistem administrasi perpajakan akan mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Menurut Fasmi dan Misra (2013), reformasi sistem administrasi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dengan adanya reformasi perpajakan yang berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya dan meningkatkan tanggung jawab aparatur pemerintah, sehingga dapat meningkatkan potensi penerimaan pajak. Hal yang sama juga didapat dari penelitian Rapina *et, al* (2011), reformasi sitem perpajakan modern mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun, penerapan sistem

administrasi perpajakan modern sebagai perwujudan program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah berkaitan dengan modernisasi struktur organisasi dan budaya organisasi yang memiliki pengaruh masih lebih rendah di antara subvariabel yang lain.

H<sub>2</sub> : Reformasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak

## **METODE PENELITIAN**

### **Pemilihan Sampel dan Pengumpulan Data**

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pati tahun 2014. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 135.592 Wajib Pajak, yang terdiri dari 8.268 Wajib Pajak badan dan 127.324 Wajib Pajak orang pribadi. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *insidental sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari responden secara langsung berupa kuesioner. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 91 Wajib Pajak.

### **Definisi Operasional Variabel**

Variabel yang diteliti pada penelitian ini adalah pengetahuan pajak dan reformasi administrasi perpajakan sebagai variabel independen, sedangkan kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen.

#### Pengetahuan Pajak

Rahayu (2010) dalam Lisnawati (2012) menyatakan bahwa tingkat pengetahuan pajak masyarakat yang memadai, akan mudah bagi Wajib Pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan. Dengan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi akan memberi keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya. Pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan yang tinggi tentunya juga akan dapat memahami bahwa dengan tidak memenuhi peraturan akan menerima sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) pengetahuan pajak dapat diukur dari pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai fungsi pajak, dan pengetahuan mengenai sistem perpajakan.

Pengetahuan pajak merupakan variabel independen yang menggunakan instrumen yang diadopsi dari Handayani, *et al* (2012) yang terdiri dari 4 item pernyataan dengan pengukuran skala likert lima poin yaitu : (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju, (5) sangat setuju.

#### Reformasi Administrasi Perpajakan

Menurut Nasucha (2004) yang dikutip dalam Rahayu dan Lingga (2009), reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih

efisien, ekonomis, dan cepat. Menurut Nasucha (2004) yang dikutip oleh Fasmi dan Misra (2013), empat dimensi reformasi administrasi perpajakan, yaitu : (1) struktur organisasi, (2) prosedur organisasi, (3) strategi organisasi, dan (4) budaya organisasi.

Reformasi administrasi perpajakan merupakan variabel independen yang menggunakan instrumen yang diadopsi dari Fasmi dan Misra (2013) yang terdiri dari 12 item pernyataan dengan pengukuran skala likert lima poin yaitu : (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju, (5) sangat setuju.

#### Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Eliyani dalam Jatmiko (2006) yang dikutip oleh Fasmi dan Misra (2013), kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan tepat waktu informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak terutang dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Kepatuhan Wajib Pajak yang dikemukakan oleh Nowak dan Nurmantu yang dikutip oleh Sinaga (2011), sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana: (1) Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan; (2) mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas; (3) menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar; (4) membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan variabel dependen yang menggunakan instrumen yang diadopsi dari Fasmi dan Misra (2013) yang terdiri dari 9 item pernyataan dengan pengukuran skala likert lima poin yaitu : (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju, (5) sangat setuju.

#### **Uji Kualitas Data**

Uji kualitas data dilakukan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas dari instrumen yang digunakan. Uji validitas menggunakan metode *product moment pearson* dengan memperhatikan signifikansi pada setiap item pernyataan. Uji reliabilitas menggunakan teknik *cronbach alpha*. Menurut Nunnaly (1969) dalam Rapina, *et al* (2011), suatu variabel maupun konstruk dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,6.

#### **Metode Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Sebelum melakukan analisis tersebut, akan dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan tidak terdapat penyimpangan pada model regresi, yaitu dengan melakukan uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolonieritas. Uji normalitas dilakukan dengan uji *Kolmogorov Smirnov* dengan memperhatikan probabilitas signifikansi dari residual data. Uji heteroskedastisitas dengan uji *Glejser*, berdasarkan probabilitas signifikansi atas



nilai absolut dari residual data. Untuk uji multikolinieritas menggunakan nilai *tolerance* dan *variance inflation factors* (VIF). Suatu model regresi yang bebas dari multikolinieritas adalah yang mempunyai nilai  $VIF \leq 10$  dan mempunyai nilai *tolerance*  $\geq 0,1$ . Persamaan model regresi yang digunakan sebagai berikut :

$$KWP = \alpha + \beta_1.PTP + \beta_2.RAP + e$$

Keterangan :

KWP : Kepatuhan Wajib Pajak

$\alpha$  : Nilai konstanta

PTP : Pengetahuan Pajak

RAP : Reformasi Administrasi Perpajakan

$\beta_1, \beta_2$  : Koefisien regresi masing-masing variabel independen

e : Faktor-faktor lain yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

## ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

### Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan di tempat-tempat Wajib Pajak yang termasuk wilayah kerja KPP Pratama Pati. Penelitian dilakukan pada tanggal 28 Januari 2015 sampai 16 Pebruari 2015, dengan cara mendatangi tempat Wajib Pajak yang bersedia mengisi kuesioner.

### Uji Kualitas Data

Hasil uji validitas untuk setiap item pernyataan dari ketiga variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1. Dari hasil uji validitas diketahui bahwa semua item pernyataan dari ketiga variabel dalam penelitian ini valid dengan nilai rentang  $r_{xy}$  antara 0,243 – 0,824 dengan nilai probabilitas 1%.

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Jumlah Item Pernyataan	Rentang $r_{xy}$	Keterangan
Pengetahuan Pajak	4	0,616 – 0,824	Semua Item Valid
Reformasi Administrasi Perpajakan	12	0,243 – 0,635	Semua Item Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	9	0,352 – 0,684	Semua Item Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2015

Hasil uji reliabilitas untuk ketiga variabel dalam penelitian ini terlihat pada Tabel 2, yang menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut reliabel dengan nilai *cronbach's alpha*  $> 0,06$ .

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pengetahuan pajak	0,689	Reliabel
Reformasi administrasi perpajakan	0,606	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,666	Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah, 2015

**Uji Asumsi Klasik**

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas pada Tabel 3, menunjukkan bahwa bahwa nilai signifikansi untuk model regresi lebih besar dari 0,01, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini memiliki sebaran data yang normal atau berdistribusi normal.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Normalitas**

Variabel	Kolmogorov – Smirrov	<i>p-value</i>	Keterangan
<i>Unstandardized Residual</i>	0,447	0,988	Sebaran data normal

Sumber : Data primer yang diolah, 2015

Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinieritas ditunjukkan oleh Tabel 4. Nilai VIF  $\leq 10$  dan mempunyai nilai *tolerance*  $\geq 0,1$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinieritas pada persamaan regresi.

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF	Keterangan
Pengetahuan pajak	0,795	1,258	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Reformasi Administrasi Perpajakan	0,795	1,258	Tidak Terjadi Multikolinieritas

Sumber : Data primer yang diolah, 2015

Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Tabel 5, yang menunjukkan bahwa semua variabel bebas memiliki nilai *p-value* lebih besar dari 0,01 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas dari masalah heteroskedastisitas.

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	<i>p-value</i>	Keterangan
Pengetahuan Pajak	0,794	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Reformasi Administrasi Perpajakan	0,073	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber : Data primer yang diolah, 2015

**Uji Regresi Berganda**

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Regresi Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
	Constant)	13.971	3.415		4.091	.000
	Pengetahuan Pajak	.680	.152	.425	4.472	.000
	Reformasi Administrasi Perpajakan	.235	.079	.281	2.962	.004

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data primer yang diolah, 2015

Hasil uji regresi berganda ditunjukkan oleh Tabel 6, sehingga diperoleh estimasi model regresi linier berganda sebagai berikut :

$$\mathbf{KWP = 13,971 + 0,680PTP + 0,235RAP + \varepsilon}$$

- 1) Konstanta sebesar 13,971 (positif) menunjukkan bahwa apabila tidak terdapat pengetahuan pajak dan reformasi administrasi perpajakan, maka kepatuhan Wajib Pajak meningkat sebesar 13,971.
- 2) Koefisien regresi pengetahuan pajak menunjukkan koefisien yang positif sebesar 0,680. Hal ini berarti dengan pengetahuan pajak meningkat sebesar 0,680, maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
- 3) Koefisien regresi reformasi administrasi menunjukkan koefisien yang positif sebesar 0,235. Hal ini berarti dengan reformasi administrasi perpajakan meningkat sebesar 0,235, maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

**Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Hasil perhitungan untuk nilai R<sup>2</sup> diperoleh dalam analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi dengan *adjusted-R<sup>2</sup>* sebesar 0,354. Hal ini berarti bahwa 35,4% variasi variabel kepatuhan Wajib Pajak dapat

dijelaskan oleh variabel pengetahuan pajak dan reformasi administrasi perpajakan sedangkan sisanya yaitu 64,6% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti.

### Uji Hipotesis

#### Uji F

Hasil uji F dengan menggunakan program *SPSS 17 for Windows* diperoleh hasil sebagai berikut :

**Tabel 7**  
**Hasil Uji F**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	405.342	2	202.671	25.632	.000 <sup>a</sup>
	Residual	695.801	88	7.907		
	Total	1101.143	90			

Sumber : Data primer diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 7, diperoleh  $F_{hitung}$  sebesar 25,632 dan  $F_{tabel} = 4,00$  Apabila dibandingkan  $F_{hitung}$  dengan nilai  $F_{tabel}$  dapat dilihat bahwa hasil uji statistik dari distribusi  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu  $25,632 > 4,00$  Hasil pengujian dapat dilihat juga signifikansi sebesar  $0,000 < 0,01$  hal ini menunjukkan model penelitian yang digunakan adalah *goodness of fit*.

#### Uji t.

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan program *SPSS 17 for Windows* diperoleh hasil sebagai berikut :

**Tabel 8**  
**Hasil Uji t**

Variabel	$t_{hitung}$	$t_{tabel}$
Pengetahuan Pajak	4,472	2,632
Reformasi Administrasi Perpajakan	2,962	2,632

Sumber: Data primer yang diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui hasil uji t untuk variabel pengetahuan pajak dan reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut :

#### 1. Pengetahuan Pajak

Dari hasil regresi diketahui bahwa besarnya nilai  $t_{hitung}$  variabel pengetahuan pajak sebesar 4,472 sedangkan besarnya nilai  $t_{tabel}$  dengan tingkat keyakinan 99% atau ( $\alpha = 0,01$ ) adalah 2,632. Karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $4,472 > 2,632$ ) maka  $H_0$  ditolak (gagal menolak  $H_1$ ), yang berarti pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada tingkat keyakinan 99% atau ( $\alpha = 0,01$ ).

## 2. Reformasi Administrasi Perpajakan

Dari hasil regresi diketahui bahwa besarnya nilai  $t_{hitung}$  variabel reformasi administrasi perpajakan sebesar 2,962 sedangkan besarnya nilai  $t_{tabel}$  dengan tingkat keyakinan 99% atau ( $\alpha = 0,01$ ) adalah 2,632. Karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,962 > 2,632$ ) maka  $H_0$  ditolak (gagal menolak  $H_2$ ), yang berarti reformasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada tingkat keyakinan 99% atau ( $\alpha = 0,01$ ).

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan pajak (PTP) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada taraf signifikansi 1% (0,01) dengan dibuktikan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $4,472 > 2,632$ ) atau nilai probabilitas sebesar  $0,000 < 0,01$ . Sehingga  $H_1$  gagal ditolak yang artinya semakin meningkat pengetahuan pajak yang dimiliki Wajib Pajak maka akan semakin meningkat pula kepatuhan pajak yang dilakukan Wajib Pajak.
2. Reformasi administrasi perpajakan (RAP) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada taraf signifikansi 1% (0,01) dengan dibuktikan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,962 > 2,632$ ) atau nilai probabilitas sebesar  $0,004 < 0,01$ , sehingga  $H_2$  gagal ditolak. Hal ini berarti dengan adanya reformasi perpajakan yang berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya.

### **Keterbatasan Penelitian**

Dalam pelaksanaan penelitian ini tentunya terdapat keterbatasan yang dialami oleh peneliti, namun diharapkan adanya keterbatasan ini tidak mengurangi tujuan dan manfaat yang ingin dicapai. Keterbatasan tersebut antara lain :

1. Penelitian ini dilakukan pada satu KPP Pratama, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan pada semua KPP Pratama yang ada di Indonesia.
2. Sampel penelitian ini tidak membedakan antara Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, sehingga memungkinkan terjadinya bias responden.
3. KPP Pratama Pati tidak memperbolehkan melakukan penelitian di lingkungan KPP dikarenakan peneliti dapat mengganggu Wajib Pajak yang berkepentingan, sehingga peneliti harus mencari Wajib Pajak ditempat yang sekiranya dapat ditemui peneliti. Oleh karena itu, penelitian membutuhkan waktu yang cukup lama.

## **Saran**

Dari hasil penelitian ini saran yang dapat disampaikan penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pati
  - a. Pengetahuan Wajib Pajak masih kurang dalam bidang perpajakan, oleh karena itu diharapkan KPP lebih banyak melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak tentang pentingnya membayar pajak.
  - b. Masih adanya Wajib Pajak yang kurang mengetahui dan memahami tentang *e-system* dan cara penggunaannya. Oleh karena itu diharapkan pihak KPP mengadakan sosialisasi dan pelatihan mengenai *e-system* kepada Wajib Pajak.
2. Bagi peneliti selanjutnya
  - a. Penelitian selanjutnya disarankan menambah jumlah KPP Pratama sehingga hasilnya dapat digeneralisasikan untuk seluruh KPP Pratama di Indonesia.
  - b. Penelitian selanjutnya disarankan menambah variabel penelitian, misalnya sosialisasi pajak, sanksi pajak, pelayanan pajak agar dapat menyempurnakan penelitian ini.
  - c. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah penelitian sebelum dan sesudahnya agar dapat diketahui pengaruh dari variabel yang digunakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fasmi, Lasnofa dan Fauzan Misra. 2013. *“Pengaruh Penerapan Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Tingkat Kepatuhan Penghasilan Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Padang”* . Jurnal Akuntansi. Universitas Andalas.
- Kuraesin, Mita. 2009. *“Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Pajak”*. Jurnal Akuntansi. Universitas Komputer Indonesia.
- Lisnawati. 2012. *“Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ”*. Skripsi. Bandung : Fakultas Ekonomi, UNIKOM.
- Nisa, Ana Choirun, Andri Wakita Aji. 2014. *“Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, Pengetahuan Peraturan Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta”*. Jurnal Akuntansi Vol. 2 No. 1 Juni 2014.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *“Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal”*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, Sri dan Ita Salsalina Lingga. 2009. *“Pengaruh Penerapan Administrasi Perpajakan Modern terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak”* .Jurnal Akuntansi Vol.1 No.2 November 2009:119-138.
- Rapina, Jerry, Yenni Carrolina. 2011. *“Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”*. Jurnal Riset Akuntansi Vol.III No.2.
- Rohmawati, Lusia, Prasetyono, Yuli Rimawati. 2012. *“Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak”*. Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4.
- Sinaga, Ulam. 2011. *“Pengaruh Pelaksanaan Administrasi Pajak Daerah dan Kepatuhan Wajib Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Pajak Daerah”*. Skripsi. Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.
- Siregar, Yuli Anita, Saryadi, Yuli Listyorini. 2012. *“Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”*. Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis Vol.1 No.1.